

## **Perkembangan Akuntabilitas Keuangan Di Sektor Publik Dalam Evaluasi Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta**

**Muhammad Raply Fahrevi<sup>1</sup>, Novita Safitri<sup>2</sup>, Asyfi Ardhiansyah<sup>3</sup>, Muhammad Bilal Akbar<sup>4</sup>**

<sup>1234</sup>Universitas Bina Sarana Informatika  
Jl. Kramat Raya No. 98, Jakarta Pusat, Indonesia

[mrplyfahrevi@gmail.com](mailto:mrplyfahrevi@gmail.com)

### **Abstrak**

Penelitian ini mengkaji tentang perkembangan evolusi tanggung jawab dalam manajemen keuangan sektor publik dan implikasinya terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta. Melalui evaluasi rasio keuangan termasuk kemandirian, efektivitas, efisiensi, dan pertumbuhan, penelitian ini mengidentifikasi pola dan perubahan dalam performa keuangan dari tahun 2021 hingga 2022. Hasil analisis menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam kemandirian keuangan, namun fluktuasi dalam efektivitas dan peningkatan dalam efisiensi pengeluaran. Meskipun terjadi peningkatan pertumbuhan keuangan pada tahun 2022, masih terdapat tantangan terkait efisiensi pengelolaan anggaran. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian memberikan beberapa saran untuk optimalisasi pendapatan asli daerah, peningkatan efisiensi pengelolaan anggaran, dan penguatan monitoring serta evaluasi kinerja keuangan secara berkala. Diharapkan implementasi saran-saran ini dapat membantu Pemerintah Kota Yogyakarta meningkatkan kinerja keuangan dan mencapai keberlanjutan keuangan yang lebih baik di masa mendatang.

**Kata Kunci:** Kinerja Keuangan, Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Pertumbuhan

### **Abstract**

*This study examines the evolution of responsibilities in public sector financial management and its implications on the financial performance of the Yogyakarta City Government. Through the evaluation of financial ratios including autonomy, effectiveness, efficiency, and growth, this research identifies patterns and changes in financial performance from 2021 to 2022. The analysis results indicate a significant increase in financial autonomy, but fluctuations in effectiveness and an increase in expenditure efficiency. Although there was financial growth in 2022, challenges remain regarding budget management efficiency. Based on these findings, the study provides several recommendations for optimizing local revenue, improving budget management efficiency, and strengthening regular monitoring and evaluation of financial performance. It is hoped that the implementation of these recommendations will assist the Yogyakarta City Government in enhancing financial performance and achieving better financial sustainability in the future.*

**Keywords:** Financial Performance, Independence Ratio, Effectiveness Ratio, Efficiency Ratio, Growth Ratio

## **1. Pendahuluan**

Otonomi daerah telah membawa Indonesia ke tahap baru dalam mengatur sumber daya yang disesuaikan dengan kebutuhan khusus tiap wilayahnya. Pengelolaan keuangan oleh pemerintah daerah memiliki peran utama dalam menciptakan dampak positif bagi penduduk lokal. Kemajuan otonomi daerah tercermin dalam manajemen keuangan yang efektif, terbuka, dan berdampak positif bagi masyarakat lokal. Keterbukaan dan pertanggungjawaban dalam mengelola keuangan merupakan faktor kunci untuk memastikan laporan finansial pemerintah yang berkualitas, memberikan informasi yang jelas, dan juga mematuhi standar akuntansi. Tanggung jawab pengelolaan keuangan pemerintahan daerah melibatkan perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan anggaran yang akan menjadi tanggung jawab lembaga legislatif dan masyarakat. (Salsabilla and Alam 2023).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah laporan finansial yang disusun oleh pemerintah daerah untuk periode tertentu yang mencerminkan kemampuan mereka dalam menjalankan tanggung jawabnya. Informasi keuangan daerah bertujuan untuk menawarkan keterbukaan serta memberikan arahan dalam mengambil keputusan ekonomi, sosial, dan politik, sambil menunjukkan tanggung jawab dalam mengelola keuangan daerah. Selain itu, laporan keuangan ini digunakan sebagai pedoman untuk menilai kinerja daerah. Analisis rasio keuangan pemerintah daerah berguna untuk menilai kinerja dan kemampuan mereka dalam mengelola keuangan secara efektif (Rani Velia Salsabilla 2023). Laporan keuangan membantu menganalisis kondisi keuangan, pencapaian tujuan unit pelaporan, serta membandingkan pendapatan, pengeluaran, transfer, dan pendanaan aktual dengan anggaran yang telah ditetapkan, menjaga kedisiplinan melalui peraturan yang digunakan dalam proses

pengambilan keputusan. Dalam menyusun laporan keuangan untuk organisasi sektor publik, perujukan dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun (Putri et al. 2021).

Kinerja keuangan adalah indikator yang mengilustrasikan seberapa jauh pencapaian tujuan keuangan dalam suatu aktivitas, meliputi aspek pemasukan dan pengeluaran dana (Susanto 2019). Sedangkan menurut (Nurajijah and Nurfadila 2022), evaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah menggambarkan sejauh mana tujuan keuangan lokal tercapai, termasuk pendapatan dan pengeluaran wilayah, dengan menggunakan parameter keuangan yang telah diatur sesuai kebijakan hukum dalam periode anggaran tertentu. Menilai kinerja keuangan wilayah merupakan cara untuk mengukur seberapa baik keuangan suatu daerah dikelola. Salah satu metode untuk mengevaluasi hal tersebut adalah dengan menerapkan analisis rasio keuangan wilayah. Langkah ini diambil untuk mengevaluasi seberapa transparan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan lokal. Transparansi tidak hanya mencerminkan cara dana publik digunakan, tetapi juga memastikan penggunaannya efisien, efektif, dan hemat (Sartika 2019).

Akuntabilitas merupakan suatu konsep yang mengacu pada kewajiban seseorang dalam tanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil. Akuntabilitas ini mengacu pada pemberi steward kepada pihak yang bertanggung jawab (Sofiyah Yatimah Tahir 2020). Menurut Halim dalam (Zeny Antika 2020), akuntabilitas merujuk pada kewajiban individu atau lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya publik yang relevan untuk memberikan pertanggungjawaban.

Mokodompit dkk menjelaskan dalam (Deby Kusuma Atmaja et al. 2023), evaluasi kinerja adalah komponen esensial dalam menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam menjalankan tanggung jawab fiskal mereka di wilayahnya. Akuntabilitas tidak hanya mencerminkan bagaimana anggaran digunakan, tetapi juga menunjukkan kemampuan dalam memberikan informasi bahwa anggaran digunakan secara bijaksana, efektif, dan efisien. Kinerja keuangan pemerintah daerah diukur melalui output atau hasil kerja dalam ranah keuangan, termasuk pendapatan dan belanja daerah, implementasi sistem anggaran sesuai kebijakan berdasarkan hukum dalam periode anggaran tertentu, dan diukur menggunakan indikator keuangan seperti analisis rasio. Salah satu pendekatan dalam mengevaluasi kinerja pengelolaan keuangan daerah adalah melalui analisis rasio keuangan terhadap realisasi anggaran. Dalam analisis ini, rasio keuangan APBD digunakan untuk membandingkan hasil dari satu periode dengan periode sebelumnya, bertujuan untuk mengidentifikasi tren yang muncul. Selain itu, perbandingan indikator fiskal antara pemerintah daerah yang serupa secara geografis atau karakteristik juga dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kondisi keuangan daerah tersebut (Rusnani Ramadhan 2023). Untuk memantau perkembangan kinerja keuangan pemerintah kota Yogyakarta, digunakan alat ukur seperti Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, dan Rasio Pertumbuhan.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengambil judul “Perkembangan Akuntabilitas Keuangan di Sektor Publik dalam Evaluasi Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta”. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kemajuan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan sektor publik dan mengeksplorasi dampaknya terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

## 2. Metode Penelitian

### 2.1 Jenis & Sumber Data

Penelitian ini menerapkan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengolah data yang berasal dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Yogyakarta pada tahun 2021 dan 2022. Data yang digunakan dalam studi ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui pengumpulan dan analisis dokumen, terutama Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta selama periode tersebut.

Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk mengumpulkan informasi secara terperinci, mengenali masalah yang ada, serta memberikan justifikasi terhadap situasi dan praktik yang sedang berlangsung. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis data dalam bentuk numerik agar kinerja keuangan pemerintahan Kota Yogyakarta dapat diukur menggunakan formula-formula khusus yang digunakan untuk mengevaluasi kemajuan akuntabilitas (Indah and Tyas 2020).

Menurut (Shofwatun, Kosasih, and Megawati 2021), kuantitatif adalah kumpulan angka-angka yang diperoleh dari hasil pengamatan atau pengukuran. Metode ini menjelaskan permasalahan yang timbul dari kebijakan keuangan atau perilaku keuangan. Sedangkan menurut (Widianto Halim et al. 2022), metode kuantitatif dapat dianggap sebagai pendekatan penelitian yang berakar pada pengetahuan yang didasarkan pada data faktual. Metode tersebut digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, di mana pengambilan sampel seringkali dilakukan secara acak. Proses pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian yang relevan, dan analisis data dilakukan dengan pendekatan kuantitatif atau statistik, dengan tujuan pengujian yang spesifik.

## 2.2 Metode Analisis

Adapun rasio keuangan yang digunakan dalam kinerja keuangan pemerintah daerah menurut (Salsabilla and Alam 2023), yaitu :

### a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Menunjukkan sejauh mana suatu wilayah dapat mengatur keuangannya sendiri tanpa terlalu tergantung pada bantuan dari pemerintah pusat atau daerah lainnya. Tingkat kemandirian yang tinggi menunjukkan kemampuan wilayah untuk memenuhi kebutuhan keuangannya secara mandiri, sementara tingkat ketergantungan yang tinggi menandakan ketergantungan wilayah pada bantuan atau sumber dana dari luar. Rumus untuk menghitung rasio kemandirian adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

### b. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Mengukur sejauh mana suatu wilayah berhasil mencapai target pendapatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini digunakan untuk mengevaluasi kesuksesan wilayah dalam mencapai pendapatan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun. Dengan kata lain, rasio ini membantu dalam menilai efisiensi dalam pengelolaan sumber daya dan upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas pendapatan asli daerah, semakin berhasil wilayah tersebut dalam mencapai tujuan pendapatan yang telah ditetapkan. Rumus untuk menghitung rasio efektivitas adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

### c. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Menunjukkan perbandingan antara biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan dari sumber-sumber tertentu dengan jumlah pendapatan yang berhasil diperoleh dari sumber-sumber pendapatan tersebut. Rasio ini memberikan gambaran tentang seberapa efisien pemerintah daerah dalam memanfaatkan sumber daya dan strategi untuk menghasilkan pendapatan. Semakin tinggi rasio efisiensi, semakin optimal penggunaan sumber daya dalam menghasilkan pendapatan, dan sebaliknya. Rumus untuk menghitung rasio efisiensi adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya yang dikeluarkan}}{\text{Belanja}} \times 100\%$$

### d. Rasio Pertumbuhan Keuangan Daerah

Menunjukkan gambaran tentang kinerja keuangan daerah secara keseluruhan dari waktu ke waktu. Jika rasio pertumbuhan positif, itu menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah mengalami peningkatan dari periode sebelumnya, yang bisa menjadi indikator kesuburan kebijakan fiskal atau potensi ekonomi wilayah tersebut. Sebaliknya, jika rasio pertumbuhan negatif, itu menandakan adanya penurunan pendapatan asli daerah, yang mungkin memerlukan evaluasi terhadap strategi pengelolaan keuangan daerah. Rumus untuk mengukur rasio pertumbuhan adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{P_n - P_o}{P_o} \times 100\%$$

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1 Penilaian Standar Rasio Keuangan Pemerintah

Metode untuk mengevaluasi perkembangan kinerja keuangan Pemerintah Kota adalah dengan memanfaatkan rasio standar yang relevan sebagai acuan perbandingan. Tanpa adanya standar yang digunakan sebagai pedoman untuk menafsirkan rasio-rasio Pemerintah, analisis tidak dapat memberikan kesimpulan apakah kondisi rasio-rasio tersebut mengindikasikan kinerja yang baik atau buruk.

**Tabel 1. Standar Rasio Keuangan**

Rasio	Standar (%)	Kriteria
Rasio Kemandirian	0 - 25	Rendah Sekali
	25 - 50	Rendah
	50 - 75	Sedang
	75 - 100	Tinggi
Rasio Efektivitas	> 100	Sangat Efektif
	90 - 100	Efektif
	80 - 90	Cukup Efektif
	60 - 80	Kurang Efektif
Rasio Efisiensi	> 100	Tidak Efisiensi
	90 - 100	Kurang Efisiensi
	80 - 90	Cukup Efisiensi
	60 - 80	Efisiensi
Rasio Pertumbuhan	< 60	Sangat Efisiensi
	0 - 10	Sangat Rendah
	11 - 20	Rendah
	21 - 30	Sedang
	> 40	Tinggi

sumber : (Rani Velia Salsabila, 2023)

#### 3.2 Laporan Realisasi APBD Pemerintah

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi APBD tahun 2021 dan 2021. Berikut Laporan Realisasi APBD Pemerintahan Kota Yogyakarta.

**Tabel 2. Ringkasan Laporan Realisasi APBD Pemerintah Kota Yogyakarta**

Uraian	Anggaran		Realisasi	
	2021	2022	2021	2022
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>				
Pendapatan Asli Daerah	515.007.357.172,00	643.171.754.454,00	598.121.885.337,87	725.577.542.997,58
Pendapatan Transfer	1.085.748.606.734,00	1.178.211.788.410,00	1.078.659.260.087,59	1.164.344.581.722,00
Lain-lain Pendapatan Yang Sah	30.636.030.000,00	-	30.492.141.917,00	-
	<b>1.631.391.993.906,00</b>	<b>1.821.383.542.864,00</b>	<b>1.707.273.287.342,46</b>	<b>1.889.922.124.719,58</b>
<b>BELANJA DAERAH</b>				
Belanja Operasi	1.612.414.966.228,00	1.675.972.430.943,00	1.445.551.076.433,00	1.560.028.542.836,60
Belanja Modal	277.709.794.062,00	318.937.100.274,00	240.007.571.435,93	263.386.424.104,00
Belanja Tidak Terduga	53.642.020.964,00	53.932.523.099,00	5.350.719.740,00	2.518.441.916,00
Belanja Transfer	1.059.517.480,00	870.844.890,00	1.059.517.480,00	870.844.890,00
	<b>1.944.826.298.734,00</b>	<b>2.049.712.899.206,00</b>	<b>1.691.968.885.088,93</b>	<b>1.826.804.253.746,60</b>
Surplus/Defisit	(313.434.304.828,00)	(237.329.356.342,00)	15.304.402.253,53	63.117.870.972,98
<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>				
Penerimaan Pembiayaan	382.914.304.828,00	328.741.356.342,00	382.916.954.088,36	329.756.608.962,89
Pengeluaran Pembiayaan	69.480.000.000,00	91.412.000.000,00	69.480.000.000,00	91.412.000.000,00
	<b>313.434.304.828,00</b>	<b>237.329.356.342,00</b>	<b>313.436.954.088,36</b>	<b>238.344.608.962,89</b>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	-	-	328.741.356.341,89	301.462.479.935,87

sumber : Laporan Realisasi APBD Kota Yogyakarta

### 3.3 Analisis Data

Berdasarkan data di atas, maka dapat diperoleh rasio keuangan untuk mengetahui perkembangan dalam menilai kinerja keuangan Pemerintahan Kota Yogyakarta yang meliputi rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi dan rasio pertumbuhan dengan perhitungan sebagai berikut :

#### a. Kinerja Keuangan Pemerintahan Kota Yogyakarta Berdasarkan Rasio Kemandirian

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2021} &= \frac{598.121.885.337,83}{1.078.659.260.087,59} \times 100\% \\ &= 55,45\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2022} &= \frac{725.577.542.997,58}{1.164.344.581.722,00} \times 100\% \\ &= 62,23\% \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan di atas, hasil rasio kemandirian keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta selama dua tahun mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2021 hingga 2022 sebesar hampir 7,78% dan menunjukkan pola hubungan instruktif interval nilai antara 50% – 70% dengan kriteria sedang. Peningkatan ini juga menunjukkan bahwa Pemerintahan Kota Yogyakarta lebih mampu membiayai pengeluarannya sendiri pada tahun 2022 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kenaikan rasio kemandirian menunjukkan adanya perbaikan dalam manajemen keuangan atau peningkatan pendapatan lokal. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), efisiensi dalam pengelolaan anggaran, atau diversifikasi sumber pendapatan. Peningkatan rasio kemandirian juga menjadi pertanda positif untuk keberlanjutan keuangan Pemerintahan Kota Yogyakarta. Semakin mandiri suatu pemerintahan daerah, semakin sedikit ketergantungan terhadap sumber-sumber pendapatan eksternal, yang dapat meningkatkan stabilitas keuangan jangka panjang. Tetapi, perlu juga untuk melakukan analisis lebih lanjut terkait faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan tersebut. Dengan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kemandirian keuangan, Pemerintah Kota Yogyakarta dapat mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk meningkatkan kinerja keuangan mereka lebih lanjut.

#### b. Kinerja Keuangan Pemerintahan Kota Yogyakarta Berdasarkan Rasio Efektivitas

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2021} &= \frac{598.121.885.337,83}{515.007.357.172,00} \times 100\% \\ &= 116,14\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2022} &= \frac{725.577.542.997,58}{643.171.754.454,00} \times 100\% \\ &= 112,81\% \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan di atas, menunjukkan bahwa rasio efektivitas Pemerintahan Kota Yogyakarta mengalami fluktuasi dari tahun 2021 hingga 2022. Pada tahun 2021, rasio efektivitas sebesar 116,14%, sedangkan pada tahun 2022, rasio efektivitas menurun menjadi 112,81%. Meskipun pada tahun 2022 rasio efektivitas masih tinggi dengan nilai di atas 100%, namun penurunan dari tahun sebelumnya menunjukkan adanya potensi peningkatan efisiensi dalam pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD). Hal ini menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam mengumpulkan pendapatan asli daerah dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Namun, pada tahun 2022, meskipun masih di atas 100%, rasio efektivitas menurun menjadi 112,81%, menandakan bahwa penerimaan PAD tidak mencapai target dengan sebaik tahun sebelumnya. Meskipun terjadi penurunan, rasio efektivitas yang masih relatif tinggi pada tahun 2022 menunjukkan bahwa Pemerintahan Kota Yogyakarta masih berhasil mengumpulkan pendapatan asli daerah dengan tingkat efektivitas yang baik. Namun, perlu dilakukan upaya untuk memperbaiki efektivitas lebih lanjut agar dapat mencapai atau melebihi target yang ditetapkan.

Oleh karena itu, perubahan yang terjadi dalam efektivitas kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta menyoroti urgensi dari upaya terus-menerus dalam pemantauan dan pengelolaan pendapatan asli daerah secara efisien guna mencapai target keuangan yang telah ditetapkan.

### c. Kinerja Keuangan Pemerintahan Kota Yogyakarta Berdasarkan Rasio Efisiensi

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efisiensi} &= \frac{\text{Biaya yang dikeluarkan}}{\text{Belanja}} \times 100\% \\ \text{Tahun 2021} &= \frac{69.480.000.000,00}{1.691.968.885.088,93} \times 100\% \\ &= 4,11\% \\ \text{Tahun 2022} &= \frac{91.412.000.000,00}{1.826.804.253.746,60} \times 100\% \\ &= 5,01\% \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan di atas, menunjukkan bahwa rasio efisiensi Keuangan Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta terjadi peningkatan dari tahun 2021 ke tahun 2022. Rasio efisiensi pada tahun 2021 mencapai 4,11%, namun meningkat menjadi 5,01% pada tahun 2022 dan dianggap sangat efisien. Peningkatan dalam rasio efisiensi dari tahun 2021 ke tahun 2022, yang mengindikasikan bahwa Pemerintahan Kota Yogyakarta mengeluarkan biaya tambahan yang lebih tinggi dibandingkan dengan total belanja pada tahun sebelumnya. Peningkatan rasio efisiensi disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kenaikan biaya operasional, proyek-proyek pembangunan baru, atau peningkatan kegiatan-kegiatan pemerintah yang memerlukan pengeluaran tambahan. Hal ini bisa menjadi hasil dari kebijakan pemerintah untuk meningkatkan infrastruktur, layanan publik, atau program-program pembangunan lainnya.

Dengan demikian, peningkatan rasio efisiensi Pemerintahan Kota Yogyakarta menunjukkan adanya perubahan dalam pola pengeluaran pemerintah. Namun, penting untuk memastikan bahwa peningkatan ini sejalan dengan upaya untuk memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat dan mendukung tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

### d. Kinerja Keuangan Pemerintahan Kota Yogyakarta Berdasarkan Rasio Pertumbuhan

$$\begin{aligned} \text{Rasio Pertumbuhan} &= \frac{P_n - P_o}{P_o} \times 100\% \\ \text{Tahun 2021} &= \frac{3.399.242.172.431,4 - 3.217.350.488.682,7}{3.217.350.488.682,7} \times 100\% \\ &= 5,65\% \\ \text{Tahun 2022} &= \frac{3.716.726.378.465,6 - 3.399.242.172.431,4}{3.399.242.172.431,4} \times 100\% \\ &= 9,34\% \end{aligned}$$

Tabel perhitungan rasio belanja di atas menunjukkan peningkatan nominal dan persentase dalam pengeluaran setiap tahun. Peningkatan belanja daerah rata-rata setiap tahun, yang mengalami pertumbuhan rata-rata 9,34%. Dari data di atas dapat dilihat bahwa pendapatan meningkat setiap tahun, baik secara nominal maupun persentase pertumbuhan. Pada tahun 2021, total pendapatan meningkat sebesar 1.707.273.287.342 dengan tingkat pertumbuhan sebesar 5,65%, dan pada tahun 2022, total pendapatan meningkat sebesar 1.889.922.124.719 dengan tingkat pertumbuhan sebesar 9,34%. Pertumbuhan yang lebih tinggi pada tahun 2022 dapat mengindikasikan adanya upaya yang berhasil dalam meningkatkan pendapatan, mengelola pengeluaran dengan lebih efisien, atau implementasi kebijakan ekonomi yang mendukung pertumbuhan. Perubahan ini menunjukkan adanya kinerja keuangan yang lebih kuat pada tahun 2022, yang dapat memberikan landasan yang lebih stabil bagi pemerintah Kota Yogyakarta untuk melaksanakan program-program pembangunan dan pelayanan publik. Akan tetapi pada tahun 2021 dan 2022 rasio pertumbuhan dikatakan sangat rendah karena memiliki interval nilai antara 0% - 10%.

## 4. Kesimpulan

Berdasarkan analisis rasio keuangan yang dilakukan terhadap Pemerintahan Kota Yogyakarta, terlihat adanya peningkatan yang signifikan dalam kemandirian keuangan dari tahun 2021 hingga tahun 2022. Peningkatan ini menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai pengeluarannya sendiri, yang bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) atau efisiensi dalam pengelolaan anggaran. Hal ini mengindikasikan keberhasilan dalam manajemen keuangan yang dapat berkontribusi pada stabilitas keuangan jangka panjang.

Meskipun kemandirian keuangan meningkat, analisis rasio efektivitas menunjukkan adanya fluktuasi dari tahun 2021 ke tahun 2022. Meskipun pada tahun 2022 rasio efektivitas masih tinggi, menurunnya dari tahun sebelumnya menunjukkan potensi untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan pendapatan asli daerah. Ini

menunjukkan betapa pentingnya untuk terus memonitor dan mengelola dengan baik pendapatan asli daerah guna mencapai target keuangan yang telah ditetapkan.

Terlebih lagi, rasio pertumbuhan menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun 2021 ke tahun 2022, menunjukkan adanya kinerja keuangan yang lebih kuat pada tahun terakhir. Meskipun demikian, rasio efisiensi yang masih relatif rendah menandakan perlunya pemerintah Kota Yogyakarta untuk memastikan bahwa pengeluaran tambahan yang dikeluarkan sejalan dengan upaya untuk memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat dan mendukung tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

## 5. Saran

Berdasarkan analisis rasio keuangan Pemerintahan Kota Yogyakarta, saran untuk mengevaluasi kinerja keuangan dan manajemen keuangan yaitu :

- a. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui berbagai cara, seperti meningkatkan pajak dan retribusi, mengoptimalkan pengelolaan aset daerah, atau mengembangkan potensi ekonomi lokal. Dengan demikian, Pemerintah dapat mengurangi ketergantungan pada pendapatan transfer dan meningkatkan kemandirian keuangan.
- b. Peningkatan efisiensi pengelolaan anggaran dengan memastikan bahwa pengeluaran tambahan yang dikeluarkan sesuai dengan prioritas pembangunan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Pemerintah perlu terus melakukan evaluasi dan pengendalian terhadap pengeluaran agar tetap efisien dan efektif.
- c. Monitoring dan evaluasi kinerja keuangan secara berkala untuk mengidentifikasi tren, pola, dan potensi masalah yang perlu ditangani. Dengan pemahaman yang lebih menyeluruh tentang variabel yang memengaruhi kinerja finansial, pemerintah dapat mengambil tindakan yang sesuai untuk memperbaiki pengelolaan dana dan mencapai target keuangan yang telah ditetapkan.

Dengan menerapkan saran-saran tersebut, diharapkan Pemerintah Kota Yogyakarta dapat memperbaiki kinerja keuangan dan mencapai stabilitas finansial yang lebih kokoh di masa mendatang.

## Referensi

- Deby Kusuma Atmaja, Risdiana Himmati, Bisnis Islam, Universitas Islam, Negeri Sayyid, Ali Rahmatullah, Tulungagung Jl Mayor Sujadi, Deby Kusuma Atmaja, Risdiana Himmati, Mahasiswa Program, Studi Manajemen, Keuangan Syariah, Uin Sayyid, Ali Rahmatullah Tulungagung, and Dosen Fakultas Ekonomi. 2023. "Jurnal Penelitian Mahasiswa Ilmu Sosial, Ekonomi, Dan Bisnis Islam (SOSEBI)." 3(1):2808–7089. doi: 10.21274.
- Indah, Yayuk, and Wahyuning Tyas. 2020. *Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Elzatta Probolinggo*. Vol. 8.
- Nurajijah, Asih, and Dina Nurfadila. 2022. *SENAKOTA-Seminar Nasional Ekonomi Dan Akuntansi*.
- Putri, Andini Utari, Vhika Meiriasari, Puspa Djuita, Kata Kunci, : Sumber, Daya Manusia, and Kualitas Laporan Keuangan. 2021. "Analisis Pengaruh Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Kantor Kelurahan Sukajaya Kota Palembang."
- Rani Velia Salsabilla. 2023. "Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019-2022." *Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019-2022*.
- Rusnani Rahmadan, Ahmad Rudini. 2023. "ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KOTAWARINGIN TIMUR ANGGARAN 2018-2021."
- Salsabilla, Rani Velia, and Iskandar Ali Alam. 2023. "Penilaian Akuntabilitas Keuangan Sektor Publik Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bandar Lampung." *Jurnal EMT KITA* 7(4):1149–56. doi: 10.35870/emt.v7i4.1605.
- Sartika, Novira. 2019. *Inovbiz Analisis Rasio Keuangan Daerah Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kepulauan Meranti*. Vol. 7.
- Shofwatun, Hilma, K. Kosasih, and Liya Megawati. 2021. "ANALISIS KINERJA KEUANGAN BERDASARKAN RASIO LIKUIDITAS DAN RASIO PROFITABILITAS PADA PT POS INDONESIA (PERSERO)." *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi* 13(1):59–74. doi: 10.22225/kr.13.1.2021.59-74.
- Sofiyah Yatimah Tahir, Evi Malia, Imam Agus Faisol. 2020. "PENGARUH AKUNTABILITAS, PARTISIPASI MASYARAKAT, PENGETAHUAN KEPALA DESA, DAN TRANSPARANSI TERHADAP KUALITAS INFORMASI LAPORAN KEUANGAN DESA DI KABUPATEN PAMEKASAN."
- Susanto, Hery. 2019. *ANALISIS RASIO KEUANGAN UNTUK MENGUKUR KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA MATARAM*. Vol. 7.
- Widianto Halim, Luthfi, Ike Sapitri, Napa Lestari, Dan Alda Wiliyana Tania, and PT Wings. 2022. "ANALISA RASIO LAPORAN KEUANGAN UNTUK MENILAI KINERJA PERUSAHAAN Sinar Mas Agro Resources and Technology TBK Tahun 2018-2020." 4(1):44–70.
- Zeny Antika, Yunika Murdayanti, Hafifah Nasution. 2020. "PENGARUH SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH, AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN, DAN PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH." *Jurnal Wahana Akuntansi* 15(2):212–32. doi: 10.21009/wahana.15.027.